

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk waktu yang lama, yang dapat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan hak yang setara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf f dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, mereka memiliki hak untuk memperoleh kesempatan kerja. Dalam konteks ini, Pemerintah sebagai badan yang berwenang memiliki peran yang sangat penting dan berkontribusi besar dalam menyusun serta meluncurkan program-program yang mendukung agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya peluang kerja.¹

Menurut Data BPS jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 16,5 juta orang, sebanyak 7,6 juta laki laki dan 8,9 juta perempuan. Per tahun 2021, tercatat 1.271 penyandang disabilitas bekerja di 72 BUMN dan 4554 penyandang disabilitas bekerja di sektor swasta yang tersebar di 588 perusahaan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja ini masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian Suhartoyo menegaskan bahwa perlindungan pekerja/buruh penyandang disabilitas dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup memadai namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik khususnya berkaitan dengan kewajiban mempekerjakan satu orang pekerja/buruh penyandang disabilitas pada perusahaan yang mempekerjakan 100 orang. Fakta tersebut menegaskan bahwa masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Penyandang disabilitas memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang setara dengan masyarakat tanpa disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, wajar jika penyandang disabilitas memperoleh perlakuan yang istimewa, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari risiko berbagai bentuk diskriminasi dan khususnya melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari total populasi global terdiri dari penyandang

¹ Suhartoyo, "Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Administrative Law & Government Journal*, Volume 2, no. 3, (2019).

² Iham Tirta dan Febriyan A, "Jumlah Disabilitas yang Bekerja di Perusahaan Masih Sedikit", *Republica Online*, (2022).

disabilitas. Mereka dianggap sebagai kelompok minoritas terbesar di seluruh dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.³

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa.⁴

Sosialisasi melahirkan bentuk pendidikan inklusif dan disabilitas pada tingkat kalurahan yang terus didampingi hingga terbentuknya sistem yang baik dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Sosialisasi dan edukasi dilakukan terhadap keluarga disabilitas psikososial dan masyarakat melalui berbagai platform yang ada di kalurahan supaya disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya. Stigma yang terlihat dalam masyarakat mengenai disabilitas psikososial sering kali membuat mereka yang mengalami disabilitas psikososial merasa terasing, dijauhi, tidak mendapatkan layanan untuk identitas diri, dipandang sebagai aib oleh keluarga, dan mengalami pembatasan.⁵

Program pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah Program Dignity Inklusi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Program ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas, keterampilan, dan kesempatan kerja bagi individu dengan berbagai jenis disabilitas. Dalam pelaksanaannya, Program Dignity Inklusi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-

³ Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, (2017), Hal. 1-4.

⁴ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *JURNAL HAM*, Volume 11 Nomor 1, (2020).

⁵ Fahri, Menanam Masa Depan, Menumbuhkan Masyarakat Inklusif, Advokasi Sosial Tentang Transpuan, Desa Ramah Anak, Disabilitas Psikososial Dan Eksistensi Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta. Pusat Rehabilitasi YAKKUM, (2021), Hlm. 54 – 78.

pemerintah, sektor swasta, serta komunitas penyandang disabilitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program ini juga mencakup pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan inklusif, serta fasilitas aksesibilitas di tempat kerja.⁶

Evaluasi terhadap program ini menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Evaluasi dilakukan dengan mengukur sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan kebijakan inklusif di masa mendatang. Salah satu aspek yang dievaluasi dalam program ini adalah peningkatan keterampilan kerja dan aksesibilitas di tempat kerja bagi penyandang disabilitas. Program ini berupaya menghilangkan hambatan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Melalui pelatihan yang diberikan, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.⁷

Dalam proses evaluasi, metode yang digunakan mencakup survei, wawancara mendalam, serta analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peserta program, keluarga mereka, pemberi kerja, serta pihak yang terlibat dalam implementasi program. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak program. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran di beberapa sektor, serta masih adanya hambatan regulasi. Oleh karena itu, evaluasi program ini juga mencakup rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa temuan menunjukkan adanya peningkatan dalam keterampilan dan partisipasi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal aksesibilitas, terutama dalam infrastruktur dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

⁶ Dian Paula April Juwan, "Pendidikan Dan Kesetaraan: Implementasinya Pada Sekolah Inklusi Perspektif Filsafat Manusia", *Jurnal Agama Hindu*, Volume 29 Nomor 2, (2024).

⁷ Vivo Mei Ester Tambunan, "Evaluasi Program Literasi Digital Disabilitas Fisik di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia Medan", *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3 No. 2, (2024), Hlm. 210-213.

Oleh sebab itu, penguatan kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan.⁸

Penggunaan teknologi dalam mendukung aksesibilitas juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program ini. Misalnya, pengembangan aplikasi berbasis digital yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi, akses pekerjaan, dan layanan publik yang ramah disabilitas. Penting juga untuk mengembangkan skema insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Dengan adanya dukungan berupa subsidi atau keringanan pajak, perusahaan akan lebih terdorong untuk menyediakan lingkungan kerja yang inklusif. Selain sektor ketenagakerjaan, sektor kewirausahaan juga dapat menjadi peluang besar bagi penyandang disabilitas. Program ini dapat mengembangkan pelatihan kewirausahaan yang lebih adaptif sehingga mereka dapat menciptakan peluang usaha sendiri dengan dukungan modal dan mentoring yang tepat.⁹

Keberlanjutan program ini memerlukan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta dan komunitas. Dengan adanya kemitraan yang kuat, program ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam menciptakan lingkungan inklusif. Selain itu, evaluasi program juga harus mencakup aspek psikososial penyandang disabilitas. Tidak hanya terkait dengan peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga bagaimana program ini berdampak pada kepercayaan diri dan kesejahteraan mental mereka. Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi program juga menjadi aspek penting. Dengan penggunaan alat digital, evaluasi dapat dilakukan lebih sistematis, serta memungkinkan pelacakan perkembangan peserta program secara lebih akurat.¹⁰

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pelatih yang terlibat dalam program ini juga sangat krusial. Pelatihan tambahan bagi tenaga pendidik dalam menangani penyandang disabilitas akan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Program ini juga dapat diperkuat dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang lebih proaktif dalam mendukung inklusivitas di berbagai sektor, termasuk dunia kerja dan pendidikan. Selain regulasi, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja. Perlu juga adanya sistem *monitoring* yang lebih terstruktur

⁸ Moh. Masfui, "Evaluasi Program Pembelajaran Inklusif Mahasiswa Autis", *Risenologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, dan Bahasa*, Volume 9 Nomor 1, (2024).

⁹ Sudadi Pranata, "Kegiatan Sosial Pemberdayaan Kreatifitas Anak-Anak Penyandang Disabilitas Melalui Program Handycraft", *Jurnal Pengabdian Universitas Catur Insan Cendekia*, Vol. 2, No. 3, (2023).

¹⁰ Juhri, "Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar", *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 2 No. 4, (2022).

untuk memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan manfaat maksimal dari program ini dan dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Perluasan cakupan program ini ke daerah-daerah terpencil juga penting agar penyandang disabilitas di seluruh wilayah dapat merasakan manfaat yang sama. Sosialisasi program harus terus ditingkatkan agar lebih banyak pihak memahami pentingnya inklusi dan turut serta dalam implementasi program ini. Keberhasilan program juga bergantung pada dukungan keluarga penyandang disabilitas, yang dapat diberikan melalui program edukasi dan pendampingan bagi keluarga. Evaluasi yang berkelanjutan akan memungkinkan program ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di masa depan. Program ini harus menargetkan berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, fisik, dan intelektual, agar manfaatnya lebih luas. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat menciptakan perubahan yang lebih besar bagi penyandang disabilitas.¹²

Evaluasi program penyandang disabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti studi kuantitatif menggunakan survei dan analisis data statistik, serta studi kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung terhadap penerima manfaat. Beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi program penyandang disabilitas meliputi tingkat partisipasi dalam pendidikan inklusif, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja, aksesibilitas fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan evaluasi program dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lembaga-lembaga terkait harus melakukan pengawasan berkala serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam proses evaluasi.¹³

¹¹ Syifa Salsabila, “Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.2, (2021), Hlm. 180-192.

¹² Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel”, *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 1, (2021), Hlm. 54-72.

¹³ Vivo Mei Ester Tambunan, “Evaluasi Program Literasi Digital Disabilitas Fisik di Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia Medan”, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3 No. 2, (2024), Hlm. 214-219.

Selain pemerintah, evaluasi program juga perlu melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang disabilitas. Partisipasi mereka penting dalam memberikan perspektif langsung dari kelompok penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah efektivitas program pendidikan inklusif. Evaluasi ini mencakup kesiapan sekolah, ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih, serta sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas harus menjamin aksesibilitas baik secara fisik maupun digital. Evaluasi perlu melihat sejauh mana fasilitas umum, transportasi, dan teknologi digital sudah mendukung kebutuhan mereka. Evaluasi program juga harus mencakup efektivitas pelatihan kerja dan akses penyandang disabilitas ke dunia kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka dan mengurangi angka pengangguran dalam kelompok ini.¹⁴ YDMI juga melaksanakan program pendidikan inklusi dari Amerika pada tahun 2019-2022. Program tersebut dilaksanakan untuk tingkat SD dan SMP, di dalam sekolah terdapat sarana dan prasarana agar para disabilitas bisa bersekolah disana.

Evaluasi juga mencakup aspek sosial, seperti penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, peningkatan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial, serta penurunan diskriminasi. Salah satu tantangan dalam evaluasi program adalah kurangnya data yang akurat dan terstruktur mengenai jumlah serta kondisi penyandang disabilitas. Kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam evaluasi yang efektif. Data yang akurat dan terperinci sangat diperlukan dalam evaluasi program. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang lebih baik guna mendukung proses evaluasi secara lebih efektif. Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas evaluasi program. Misalnya, aplikasi berbasis digital dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara real-time dan memberikan analisis yang lebih akurat.¹⁵

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, diperlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak dalam hal pendanaan, kebijakan, serta implementasi program yang lebih terstruktur. Selain itu, inovasi dalam strategi pemberdayaan dan pendekatan yang lebih berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, Program Dignity Inklusi dapat terus berkembang dan menjadi model dalam

¹⁴ Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, (2021), Hlm. 1-18.

¹⁵ Binsar Martua Valentino Sinaga, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak-Hak Disabilitas Melalui Mini Project Ramah Disabilitas", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3, (2023), Hlm. 240-246.

pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai daerah. Dukungan kebijakan yang lebih kuat diperlukan agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Regulasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas, seperti kebijakan kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan, dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong inklusivitas di sektor ketenagakerjaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini harus terus ditingkatkan. Program edukasi yang menasar komunitas dan lingkungan sosial penyandang disabilitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.¹⁶

Evaluasi juga mencakup efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak. Program Dignity Inklusi berusaha memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan belajar yang setara melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Evaluasi juga menilai bagaimana program ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap disabilitas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Oleh karena itu, kampanye edukasi dan advokasi turut menjadi bagian dari program untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.¹⁷

Evaluasi program memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi suatu program atau kebijakan. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai atau apakah ada kendala yang perlu diperbaiki. Dengan mengevaluasi program secara sistematis, pengelola dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan, hasil, serta dampaknya, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis data dan bukti nyata. Secara keseluruhan, evaluasi program bukan hanya sekadar mengukur keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan. Tanpa evaluasi, program bisa berjalan tanpa arah yang jelas dan berisiko menghabiskan sumber daya tanpa memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi program harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program.¹⁸

¹⁶ Ananda Aprillia, "Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 6 No. 2, (2021).

¹⁷ Rizla Saradia Agustina, Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya, *Publika*, Volume 9 Nomor 3, (2021), Hlm. 109-124.

¹⁸ Heroza Firdaus, "Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 Nomor 4, (2022).

Yayasan Difabel Mandiri Indonesia merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan dan belum mendapatkan kesempatan yang setara seperti masyarakat pada umumnya. Yayasan ini juga dapat dipahami sebagai sarana untuk mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera bagi para penyandang disabilitas, sekaligus sebagai simbol masyarakat inklusif yang mampu menerima dan menghargai segala bentuk keberagaman dan perbedaan. Keberagaman tersebut mencakup aspek budaya, bahasa, gender, ras, suku, tingkat ekonomi, serta kondisi fisik dan mental. Selain itu, yayasan ini juga berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan khusus guna melengkapi pengetahuan para difabel agar mereka siap berperan aktif di tengah masyarakat, mandiri, dan tidak menjadi beban, melainkan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.¹⁹

Dignity Inklusi terbentuk pada tahun 2023. Dignity Inklusi adalah program kerjasama Australia-Indonesia yang berfokus pada isu-isu terkait penyandang disabilitas. Hasil kerja Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) mendapat pengakuan positif dari pemerintah daerah. Setelah selesainya program sebelumnya pada tahun 2023, YDMI kembali mengajukan proposal dan berhasil membentuk program lanjutan yang dikenal sebagai Program Dignity Inklusi. Dalam pelaksanaannya, YDMI berperan sebagai mitra sub-daerah, sedangkan mitra utama berasal dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kebijakan lokal hingga nasional terkait isu-isu tersebut. Program Dignity Inklusi mencakup beberapa isu, di antaranya: Psikososial, Akses ketenagakerjaan dan kewirausahaan, Partisipasi politik penyandang disabilitas. Pada tahun 2023 terbentuk nya program dignity inklusi, YDMI menjadi mitra sub daerah, mitra utama dari program Dignity Inklusi ini adalah Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta, Dignity inklusi berfokuskan pada ODDP (Orang Dengan Disabilitas Psikososial) penanganan setelah mereka di rehabilitas. YDMI menerangkan bahwa program dignity inklusi ini terbuka untuk umum, jadi disabilitas maupun non-disabilitas bisa ikut serta dalam kegiatan ini, kegiatan dignity inklusi dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Karawaci Baru. Program dignity inklusi yang dilaksanakan di Karawaci Baru membuat sabun cuci dan di Sukasari membuat kerajinan *bucket snack*, Tujuan program Dignity Inklusi yaitu ketika program berakhir mereka masih bisa tetap menjalankan hidup dari kewirausahaan yang sudah diajarkan. Banyak teman-teman ODDP yang sudah keluar setelah dirawat dari rumah sakit jiwa kembali

¹⁹ Profil Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) 2024

lagi kesana setelah tiga bulan, maka dari itu teman teman ODDP harus kita rangkul sebagaimana kita merangkul para disabilitas yang lain.²⁰

Penulis tertarik mengambil judul ini karena program dignity inklusi merupakan program baru yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas psikososial dalam masa rehabilitasi, para penyandang disabilitas lain juga bisa ikut serta dalam kegiatan program dignity inklusi yang dilaksanakan pada setiap kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program dignity inklusi oleh Yayasan Difabel Mandiri Indonesia di Kecamatan Tangerang?
2. Bagaimana evaluasi program dignity inklusi terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Tangerang?
3. Bagaimana dampak program dignity inklusi terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program dignity inklusi oleh Yayasan Difabel Mandiri Indonesia di Kecamatan Tangerang.
2. Untuk mengetahui evaluasi program dignity inklusi yang sudah diberikan terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Tangerang.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang sudah diberikan dari program dignity inklusi terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya skripsi ini, penulis dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini dibuat agar dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai bagaimana program dignity inklusi di Kecamatan Tangerang.
2. Secara Praktis

²⁰ Tuti Alawiyah, Keuangan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, diwawancarai oleh Penulis di lokasi penelitian, 24 Desember 2024

a. Bagi Penulis

Supaya penulis dapat membagikan pengalaman yang telah dirasakan dan berpikir ilmiah dari skripsi ini juga dapat menambah banyak wawasan dan pengetahuan serta bisa berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas lainnya.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan program selanjutnya agar lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penyusun mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang direkomendasikan oleh akademik fakultas dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2025. Penyusunan diuraikan sebagai berikut :

BAB Pertama, yaitu, pendahuluan, berisi pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, yaitu, berisi pembahasan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB tiga, yaitu, metode penelitian dan gambaran umum Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

BAB empat, yaitu, Hasil dan Pembahasan Program dignity inklusi Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Tentang Implementasi Program Dignity Inklusi Oleh Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Di Kecamatan Tangerang.

BAB lima, yaitu Hasil dan Pembahasan Program dignity inklusi Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Tentang Evaluasi Program Dignity Inklusi Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Tangerang dan Dampak Program Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tangerang.

BAB Enam, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.